

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Presiden di Indonesia tidak sekadar menjadi ajang demokrasi lima tahunan melainkan juga momentum penting bagi konstruksi wacana politik nasional. Dalam setiap kontestasi pemilu, pidato calon presiden pasca pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu menjadi perhatian publik karena berfungsi sebagai simbol penerimaan, resistensi, atau rekonsiliasi terhadap hasil politik. Momen ini memperlihatkan bagaimana komunikasi politik beroperasi dalam dimensi simbolik dan retorik untuk mengendalikan emosi kolektif masyarakat (Sujoko & Widodo, 2023). Dalam konteks komunikasi politik modern pidato semacam ini tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan politik saja tetapi juga sebagai strategi untuk menata persepsi publik terhadap legitimasi hasil pemilu (Santi *et al.*, 2024). Kehadiran media sosial yang masif menjadikan pesan politik tersebut viral yang akhirnya memengaruhi opini publik dan menumbuhkan sikap penerimaan atau perlawanan terhadap hasil demokrasi (Setyonegoro *et al.*, 2025). Dengan demikian pidato pasca pemilu dapat dipahami sebagai cermin dari kapasitas seorang aktor politik dalam mengelola legitimasi kekuasaan melalui bahasa dan simbol.

Dalam konteks ini Prabowo Subianto menjadi figur menarik untuk dianalisis karena kehadirannya yang konsisten dalam tiga pemilu presiden berturut-turut yaitu tahun 2014, 2019, dan 2024 dengan hasil dan konteks politik yang berbeda. Pada tahun 2014 dan 2019 Prabowo menempati posisi oposisi setelah kekalahan dari Joko Widodo walaupun pada akhirnya pada tahun 2019 Prabowo bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi sementara pada tahun 2024 ia akhirnya ditetapkan sebagai presiden terpilih. Transformasi peran politik ini diikuti dengan perubahan gaya komunikasi dan narasi pidato yang signifikan. Pada pemilu tahun 2014 Prabowo dikenal dengan gaya pidato tegas, penuh semangat nasionalisme, dan cenderung konfrontatif terhadap lawan politiknya (Ramadhani *et al.*, 2024) Namun pada tahun 2024, pidatonya cenderung lebih moderat, inklusif, dan menekankan pada rekonsiliasi nasional (Jelita *et al.*, 2025). Pergeseran ini

menunjukkan dinamika pidato politik yang menyesuaikan konteks sosial dan posisi kekuasaan sehingga menarik untuk dikaji secara mendalam melalui analisis isi.

Pidato dalam konteks politik Indonesia memiliki kekhasan tersendiri karena tidak hanya mencerminkan strategi persuasi tetapi juga mengandung dimensi moral dan kultural yang kuat. Menurut Aristoteles dalam buku karya Sulistyarni *et al.* (2020) yang berjudul *Retorika: Buku Ajar*, seni berbicara yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuatan logika (*logos*) tetapi juga pada kredibilitas pembicara (*ethos*) dan kemampuan menggugah emosi audiens (*pathos*). Konsep ini tetap relevan untuk menganalisis gaya komunikasi politik modern seperti Prabowo Subianto yang berusaha menyeimbangkan kekuatan rasionalitas, moralitas, dan emosi dalam setiap pidatonya. Sebagaimana diungkap oleh Arriani (2023), politisi yang mampu menggabungkan *ethos*, *pathos*, dan *logos* secara harmonis akan membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi politiknya. Dalam kasus Prabowo perpaduan ketiga unsur ini tampak dalam upayanya menyampaikan pesan kebangsaan yang kuat namun juga menyentuh sisi emosional masyarakat pasca pemilu.

Secara historis pidato pasca pemilu memiliki makna yang mendalam dalam menjaga kesinambungan demokrasi. Prabowo pada tahun 2014 menolak hasil pemilu dan memilih jalur hukum, sedangkan pada tahun 2019 ia menunjukkan sikap yang lebih kompromistis dengan akhirnya menerima hasil dan menjalin rekonsiliasi politik dengan Joko Widodo. Sementara pada tahun 2024 menjadi simbol perubahan total menandai keberhasilannya dalam mengelola retorika pidato dari oposisi menuju penguasa. Hal ini sejalan dengan temuan Manik, Tarigan, dan Sihite (2024) yang menyatakan bahwa dalam komunikasi politik, dominasi *ethos* (kredibilitas dan moralitas) merupakan faktor utama yang meningkatkan penerimaan publik terhadap tokoh politik. Prabowo melalui narasi patriotisme dan ketulusan berusaha mengonstruksi citra diri sebagai sosok negarawan yang siap merangkul semua pihak. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana pidato politik berperan dalam menciptakan jembatan komunikasi di tengah potensi polarisasi sosial yang tinggi.

Fenomena ini semakin relevan bila dikaitkan dengan teori komunikasi politik yang dikemukakan oleh McNair (2017), yang menegaskan bahwa politik

modern tidak hanya berfungsi sebagai arena pertukaran ide, tetapi juga sebagai *performance of symbolic power*. Dalam pandangannya komunikasi politik adalah proses di mana makna kekuasaan dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertontonkan melalui wacana publik, simbol, dan media massa. McNair (2017) menyebut bahwa dalam era *mediatized politics*, citra dan pesan menjadi komoditas utama yang menentukan persepsi publik terhadap legitimasi pemimpin. Oleh karena itu komunikasi politik bukan lagi sekadar penyampaian kebijakan melainkan upaya strategis membangun narasi yang menggugah emosi dan rasionalitas pemilih. Dalam konteks ini pidato politik menjadi instrumen sentral bagi aktor politik untuk mengelola kesan publik dan menegaskan otoritas simboliknya. Seperti dikatakan McNair (2017), keberhasilan komunikasi politik sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengontrol narasi dan mengelola makna yang diproduksi media. Dengan demikian analisis terhadap pidato politik Prabowo Subianto dapat dipahami sebagai bagian dari proses *mediatized politics* di mana simbol, bahasa, dan performa publik berperan penting dalam membentuk persepsi kekuasaan di mata masyarakat. Dalam kerangka ini pidato politik berfungsi bukan hanya sebagai alat penyampaian kebijakan tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan persepsi publik (Sujoko & Widodo, 2023). Ketika seorang tokoh politik berbicara setelah penetapan hasil pemilu ia sejatinya sedang membingkai citra dirinya di hadapan bangsa dan dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Fikri (2025), ujaran pejabat publik memiliki kekuatan moral dan epistemik untuk membentuk realitas sosial yang baru seperti kata-kata seorang pemimpin dapat menjadi arah moral kolektif bagi masyarakat. Oleh sebab itu memahami pidato Prabowo Subianto dalam tiga konteks berbeda menjadi penting untuk mengetahui bagaimana bahasa politik bekerja sebagai alat legitimasi dan transformasi sosial.

Komunikasi politik pasca pemilu selalu menjadi arena yang menentukan bagi stabilitas sosial dan legitimasi pemerintahan. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, narasi yang disampaikan calon presiden setelah pengumuman hasil pemilu berperan besar dalam membangun atau meredakan polarisasi politik. Menurut Santi, Katimin, dan Samosir (2024), seni persuasi politik memainkan peran penting dalam membentuk opini publik khususnya ketika masyarakat berada dalam situasi ketegangan akibat perbedaan pilihan politik. Pidato yang disusun

dengan strategi retorik yang tepat dapat menjadi alat untuk menenangkan massa, memulihkan kepercayaan publik, dan memperkuat legitimasi hasil demokrasi. Prabowo Subianto memanfaatkan retorika politik sebagai sarana memulihkan narasi persatuan bangsa melalui pesan-pesan nasionalisme. Hal ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik tidak sekadar menyampaikan pesan tetapi juga membangun *sense of belonging* yang mempersatukan kelompok sosial yang berbeda. Dalam era pasca kebenaran (*post-truth*), kemampuan mengelola retorika menjadi semakin penting karena publik lebih terpengaruh oleh gaya penyampaian dan kredibilitas dibanding sekadar isi kebijakan.

Dalam politik digital yang semakin kompleks, media sosial berperan sebagai katalis yang memperkuat efek retorika politik terhadap publik. Penelitian Setyonegoro *et al.* (2025) menunjukkan bahwa interaksi antara elite politik dan publik di ruang digital memungkinkan pembentukan opini secara cepat dan masif. Dalam hal ini pidato Prabowo yang disiarkan melalui platform seperti YouTube dan media daring lainnya bukan hanya dikonsumsi sebagai pesan formal, melainkan sebagai *content politik* yang memicu diskursus publik di dunia maya. Ketika Prabowo menyampaikan pidatonya pasca pengumuman KPU gaya bahasanya yang kini lebih tenang dan berimbang menunjukkan kesadarannya terhadap audiens digital yang menilai setiap ekspresi secara instan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi politik kini bergeser dari sekadar persuasi verbal menjadi manajemen wacana publik yang terencana.

Selain itu komunikasi politik juga berfungsi sebagai cermin hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam buku "*Komunikasi Politik: Ruang Lingkup, Teori, dan Metode Risetnya*" karya Sujoko & Widodo (2023), komunikasi politik melibatkan proses simbolik antara aktor politik, media, dan publik yang saling memengaruhi dalam pembentukan realitas politik. Melalui pidato seorang tokoh politik tidak hanya berbicara kepada rakyat, tetapi juga menegosiasikan makna kekuasaan dengan media dan lawan politiknya. Dalam kasus Prabowo setiap pidato pasca pemilu merupakan negosiasi antara citra dirinya sebagai patriot bangsa dan realitas politik yang mengharuskannya untuk tampil sebagai tokoh rekonsiliatif. Strategi ini terlihat ketika pada tahun 2024 ia menegaskan pentingnya persatuan nasional dan keterbukaan terhadap lawan politik

sebagai simbol kedewasaan demokrasi. Dengan demikian pidato politik Prabowo tidak hanya dapat dibaca sebagai ekspresi personal, tetapi juga sebagai representasi komunikasi kekuasaan yang memelihara stabilitas politik nasional.

Isu sosial yang muncul dari setiap pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi politik memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan masyarakat. Menurut penelitian Rahmadi *et al.* (2024), komunikasi politik yang efektif mampu menciptakan identifikasi emosional antara pemimpin dan masyarakat yang pada akhirnya menguatkan kepercayaan terhadap sistem politik. Pidato Prabowo yang menekankan nilai persaudaraan dan cinta tanah air menjadi strategi komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa kebangsaan di tengah masyarakat yang terpecah. Namun sebagaimana diingatkan oleh Santi *et al.* (2024), penggunaan retorika juga memiliki potensi memperdalam polarisasi jika pesan tidak disampaikan dengan sensitivitas sosial yang tepat. Oleh karena itu penting bagi politisi untuk memahami keseimbangan antara persuasi dan etika komunikasi.

Secara lebih luas fenomena komunikasi politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi informasi dan munculnya budaya politik digital. Penelitian Ramadhani *et al.* (2024) mengungkap bahwa kompetisi politik modern bukan hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang siber yang mengedepankan visualisasi dan emosi. Fenomena komunikasi politik digital pasca pemilu memperlihatkan bagaimana media sosial berperan sebagai ruang publik baru tempat masyarakat menegosiasikan makna kekuasaan dan legitimasi politik. Penelitian Yutanti, Rahadi, Mohideen, dan Selcuk (2025) menunjukkan bahwa setelah pengumuman hasil Pemilu Presiden 2024, sebagian besar wacana publik di media sosial, khususnya pada akun Instagram @Tempo.co, didominasi oleh sentimen netral. Kondisi ini menggambarkan munculnya pola komunikasi politik yang lebih reflektif di mana masyarakat tidak lagi terjebak dalam dikotomi pro dan kontra, tetapi justru mengedepankan moderasi dan rasionalitas dalam menanggapi hasil demokrasi. Netralitas sentimen publik ini menunjukkan adanya bentuk *digital deliberation*, yakni proses dialog dan negosiasi makna yang memperkuat kedewasaan politik masyarakat di ruang maya. Dalam konteks ini media sosial berfungsi bukan hanya sebagai saluran ekspresi politik, tetapi juga sebagai arena reproduksi opini publik dan pembentukan konsensus sosial. Temuan (Yutanti *et al.*

(2025) menegaskan bahwa interaksi politik digital turut membentuk legitimasi simbolik terhadap hasil pemilu dan meneguhkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu memahami dinamika opini publik di media sosial menjadi krusial untuk menjelaskan bagaimana pesan politik, termasuk pidato tokoh seperti Prabowo Subianto, diresonansikan dan dimaknai oleh masyarakat pasca pemilu.

Dengan demikian pidato politik kini tidak hanya diukur dari isi pesannya, tetapi juga dari daya viralisasi dan penerimaan publik di ruang digital. Dalam konteks ini perubahan gaya komunikasi Prabowo dari retorika agresif menuju narasi rekonsiliasi mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan zaman yang mengedepankan citra kepemimpinan yang sejuk dan moderat. Sejalan dengan konsep dari Aristoteles, daya tarik emosional menjadi faktor dominan dalam membangun legitimasi publik di tengah masyarakat yang haus akan figur pemersatu. Oleh sebab itu pidato pasca pemilu bukan sekadar refleksi politik, melainkan bagian dari praktik komunikasi yang memelihara harmoni sosial di tengah dinamika demokrasi yang terus berubah.

Pidato politik pasca pemilu bukan hanya berdampak pada stabilitas politik makro tetapi juga pada dinamika psikologis dan sosial masyarakat. Menurut Rahmadi *et al.* (2024), pesan politik yang disampaikan secara empatik dan konstruktif dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan baru. Sebaliknya retorika yang menonjolkan konflik atau dikotomi "*kita versus mereka*" cenderung memperdalam ketegangan sosial. Dalam pidato Prabowo pada tahun 2024 menjadi momen penting karena berhasil menampilkan figur yang berorientasi pada persatuan nasional berbeda dengan gaya konfrontatifnya pada tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa perubahan gaya komunikasi dapat menggeser persepsi publik dari antagonisme menjadi rekonsiliasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, retorika efektif harus mengandung *pathos* kemampuan menggugah emosi publik agar pesan moral dapat diterima secara luas. Dengan demikian, strategi retorika yang humanis menjadi kunci dalam menciptakan komunikasi politik yang mendamaikan.

Pada level individu perubahan gaya komunikasi politik tokoh publik juga berpengaruh terhadap cara masyarakat memandang kepemimpinan. Prabowo yang

dahulu dikenal keras dan konfrontatif kini menampilkan persona yang lebih paternalistik dan mengayomi, sebagaimana konsep *Ing ngarso sung tulodo* yang dijelaskan oleh (Arrianie, 2023). Transformasi ini memperlihatkan bahwa pidato politik tidak hanya mencerminkan isi pikiran seorang tokoh tetapi juga merupakan sarana untuk membangun kredibilitas moral (*ethos*). Ketika pidato politik disampaikan dengan narasi persaudaraan dan ketulusan, publik cenderung mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai yang diusung pemimpin tersebut. Hal ini memperkuat argumen Fikri (2025) bahwa ujaran pejabat publik memiliki kekuatan moral dalam membentuk kesadaran sosial dan norma komunikasi masyarakat. Oleh karena itu dampak retorika politik Prabowo dapat dirasakan tidak hanya dalam ranah politik, tetapi juga dalam pembentukan budaya komunikasi publik yang lebih beretika.

Bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya terpolarisasi akibat kontestasi politik pidato pasca pemilu menjadi jembatan untuk memulihkan rasa kebangsaan yang sempat terkoyak. Menurut penelitian Santi *et al.* (2024), komunikasi politik yang berlandaskan nilai persuasi dan empati mampu menciptakan ruang dialog antar kelompok yang berbeda pandangan. Pidato Prabowo pada 2024 yang menekankan persatuan bangsa dapat dibaca sebagai upaya untuk menenangkan publik yang terbagi akibat kampanye politik yang intens.

Sejalan dengan teori opini publik yang dikemukakan oleh Lippmann (1922), masyarakat membentuk pandangannya terhadap realitas politik bukan berdasarkan pengalaman langsung melainkan melalui *pictures in our heads* gambaran mental yang dibentuk oleh media dan komunikasi politik. Lippmann menjelaskan bahwa opini publik lahir dari persepsi yang dibangun atas representasi simbolik, bukan dari fakta yang sepenuhnya objektif. Dalam konteks penelitian ini pidato politik Prabowo Subianto penting dilakukan untuk membentuk citra dan kerangka berpikir masyarakat pada situasi pasca pemilu. Ketika seorang pemimpin menyampaikan pesan yang menenangkan dan rekonsiliatif maka representasi simbolik yang diterima publik pun menjadi lebih positif terhadap stabilitas politik. Lippmann (1922) menegaskan bahwa media dan wacana publik berfungsi sebagai *pseudo-environment* yang membentuk bagaimana masyarakat memahami realitas politik. Oleh karena itu narasi politik yang mengandung nilai empati dan persatuan dapat

mengarahkan opini publik dari polarisasi menuju konsensus nasional. Dalam konteks Indonesia hal ini menjadi penting untuk menjaga kohesi sosial di tengah perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang beragam.

Kajian mengenai retorika politik telah banyak dilakukan namun sebagian besar hanya berfokus pada satu momen atau periode politik tertentu. Penelitian Ramadhani *et al.* (2024) menyoroti strategi komunikasi dalam debat capres dan menemukan bahwa pasangan Prabowo-Gibran menonjolkan tema stabilitas dan keamanan sebagai bentuk persuasi rasional. Temuan serupa dikemukakan oleh Manik *et al.* (2024) yang menemukan bahwa Prabowo mengandalkan *ethos* sebesar 39% dalam konstruksi retorikanya menunjukkan dominasi citra kredibel dan moral dibanding retorika emosional. Sementara itu, penelitian Jelita *et al.* (2025) terhadap pidato pelantikan 2024 menunjukkan dominasi unsur *logos* berupa penyusunan argumen sistematis mengenai arah pembangunan bangsa. Ketiga studi ini memperlihatkan keberagaman fokus analisis retorika, namun belum mengkaji secara longitudinal perubahan gaya komunikasi Prabowo dalam tiga periode pemilu yang berbeda. Oleh sebab itu penelitian ini berupaya menutup kesenjangan tersebut melalui analisis isi yang bersifat historis dan komparatif.

Selain penelitian nasional beberapa studi internasional juga menunjukkan relevansi antara pidato politik dan pembentukan opini publik. Misalnya penelitian Gennaro & Ash (2024) yang dikutip oleh Santi *et al.* (2024) menegaskan bahwa penggunaan metafora dan bahasa simbolik dalam pidato politik dapat meningkatkan kedekatan emosional antara pemimpin dan publik. Temuan ini sejalan dengan teori *logos* dari Aristoteles, bahwa argumen logis yang dikombinasikan dengan simbol-simbol emosional mampu memperkuat daya persuasi politik. Di sisi lain, penelitian Setyonegoro *et al.* (2025) dalam *Al-Ishlah Journal* menemukan bahwa dalam konteks politik digital, strategi framing dan *critical discourse analysis (CDA)* menjadi penting untuk memahami hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menempati posisi unik karena belum adanya penelitian yang mengkaji pidato politik Prabowo Subianto pasca pengumuman resmi hasil pemilihan presiden oleh KPU pada 3 periode pemilu berbeda menggunakan teori retorika Aristoteles. Pendekatan ini diharapkan mampu

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang evolusi komunikasi politik Prabowo Subianto dari 2014 hingga 2024 menggunakan teori retorika Aristoteles.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek pidato dan komunikasi politik Prabowo Subianto sebagian besar masih bersifat parsial dan terfokus pada satu konteks waktu tertentu. Kajian Jelita *et al.* (2025) misalnya, hanya meneliti pidato pelantikan 2024, sedangkan Ramadhani *et al.* (2024) menyoroti debat capres yang berlangsung sebelum pemilihan. Tidak ada penelitian yang secara komprehensif membandingkan retorika pidato Prabowo dalam tiga momentum berbeda yakni pasca pengumuman hasil Pemilu oleh KPU 2014, 2019, dan 2024. Padahal transformasi ini penting karena memperlihatkan dinamika komunikasi dari tokoh oposisi menjadi figur pemersatu bangsa. Menurut Sujoko & Widodo (2023), pendekatan longitudinal dalam analisis komunikasi politik diperlukan untuk memahami bagaimana perubahan konteks sosial memengaruhi bentuk dan makna pesan politik. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut melalui kajian analisis isi yang menelusuri pergeseran narasi, simbol, dan strategi retorika dalam pidato Prabowo sepanjang satu dekade.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis retorika dalam pidato politik Prabowo Subianto melalui teks pidato pasca pengumuman resmi hasil Pemilihan Presiden oleh KPU tahun 2014, 2019, dan 2024 dengan menggunakan kerangka teori retorika Aristoteles, khususnya pada unsur *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menelaah secara sistematis bagaimana ketiga unsur retorika digunakan dalam membangun pesan politik pada konteks pasca pemilu yang sarat dinamika dan interpretasi publik. *Ethos* dipahami sebagai kredibilitas pembicara yang tercermin melalui *phronesis* (kebijaksanaan), *arete* (moralitas), dan *eunoia* (niat baik), sehingga menunjukkan bagaimana pembicara membangun kepercayaan audiens (Maarif, 2015). *Pathos* dianalisis sebagai strategi pengelolaan emosi yang melibatkan berbagai bentuk perasaan serta karakter audiens, yang berperan dalam membentuk respons psikologis terhadap pesan (Maarif, 2015). Sementara itu, *logos* diposisikan sebagai struktur rasional dalam penyusunan argumen yang mencakup penggunaan sampel, adagium, dan *enthymeme* sebagai dasar pembentukan logika persuasi (Maarif, 2015). Ketiga

unsur ini menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi dan mengkategorisasi isi pidato politik yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi untuk memahami makna yang terkandung dalam teks pidato secara mendalam dan sistematis. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berupa teks pidato politik Prabowo Subianto pada tiga periode pemilu, kemudian menganalisisnya melalui tahap identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi berdasarkan unsur-unsur retorika Aristoteles beserta turunannya. Setiap bagian teks diklasifikasikan ke dalam kategori *ethos*, *pathos*, dan *logos* untuk melihat pola penggunaan retorika pada masing-masing periode. Hasil analisis tersebut selanjutnya dibandingkan guna menemukan kecenderungan dominasi unsur retorika tertentu dalam setiap pidato, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik retorika yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap keberadaan unsur retorika secara terpisah, tetapi juga melihat keterkaitan antarunsur dalam membentuk pesan politik yang persuasif serta relevan dengan konteks komunikasi politik pasca pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana retorika pada teks pidato politik Prabowo Subianto pasca pengumuman resmi hasil Pemilihan Presiden oleh KPU tahun 2014, 2019, dan 2024 dalam unsur *ethos*, *pathos*, *logos*?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retorika dalam unsur *ethos*, *pathos*, dan *logos* pada teks pidato politik Prabowo Subianto pasca pengumuman resmi hasil Pemilihan Presiden oleh KPU tahun 2014, 2019, dan 2024. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkategorisasi isi teks pidato berdasarkan ketiga unsur retorika Aristoteles beserta turunannya, yaitu *phronesis*, *arete*, dan *eunoia* pada *ethos*, emosi dan karakter pada *pathos*, serta sampel, adagium, dan *enthymeme* pada *logos*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya dalam analisis retorika pada teks pidato politik di Indonesia. Melalui penerapan teori retorika Aristoteles yang menekankan unsur *ethos*, *pathos*, dan *logos*, penelitian ini memperkuat pemahaman akademis mengenai mekanisme persuasi dalam teks pidato politik, terutama dalam konteks pasca pemilu yang sarat dinamika politik. Fokus pada analisis isi memungkinkan kajian yang lebih terstruktur dalam mengidentifikasi pola retorika berdasarkan kategori-kategori yang sistematis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam studi komunikasi politik, khususnya dalam memahami bagaimana strategi retorika digunakan untuk membangun kredibilitas, mengelola emosi audiens, serta menyusun argumentasi rasional dalam pidato politik. Temuan penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang transformasi strategi retorika dan konstruksi legitimasi kekuasaan dalam dinamika demokrasi modern di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pidato politik dengan pendekatan yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a) Bagi praktisi komunikasi politik, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi komunikasi pasca pemilu yang etis, efektif, dan berorientasi pada rekonsiliasi publik.
- b) Bagi aktor politik, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pentingnya retorika dan penyampaian pesan pada publik dalam menjaga kepercayaan pendukung atau konstituen.
- c) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kritis terhadap peran retorika politik.